

PENGARUH PENDUDUKAN JEPANG TERHADAP MASYARAKAT MAGELANG 1942-1945

Nugroho Adi Perdana
SMA N 1 Magelang

ABSTRACT

Japan entered through Yogyakarta to Magelang, on March 6, 1942, unlike the Dutch who thought Japan estimation will come from Semarang. The arrival of Japan was warmly welcomed because people already feel hate with the Dutch who like to act arbitrarily. Japan imposed political policies of the economic system of war (kriegwirtschaft) that everything is intended to meet the needs of war. Policies include deposit obligation of rice, romusha, taxes, changes in the system of government (decentralization). This policy affects the economy of the people who declined Magelang and adversely affects the condition of society and cause various problems of hunger, lack of clothing, poverty, and social problem from health problems and high death rates are very high. But there is also a positive impact such as the introduction of new rice planting system and the established system of Japanese school in Magelang. The young men in addition to getting a formal education also received military training which is beneficial for the survival struggle of the people of Magelang in the future.

Key words: Japanese occupation, struggle, Magelang

ABSTRAK

Jepang masuk melalui Yogyakarta ke Magelang, tepatnya tanggal 6 Maret 1942, tidak seperti perkiraan Belanda yang mengira Jepang akan datang dari arah Semarang. Kedatangan Jepang disambut baik karena orang sudah merasa benci Magelang dengan Belanda yang suka bertindak sewenang-wenang. Jepang menerapkan kebijakan politik dari sistem ekonomi perang (kriegwirtschaft) yang semuanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Kebijakan yang mencakup pula kewajiban simpanan wajib beras, romusha, pajak, perubahan sistem pemerintahan (desentralisasi). Kebijakan ini mempengaruhi perekonomian masyarakat yang menolak Magelang dan berakibat buruk pada kondisi masyarakat dan menyebabkan berbagai masalah kelaparan, kekurangan pakaian, kemiskinan, dan masalah sosial dari masalah kesehatan dan tingkat kematian sangat tinggi. Tapi ada juga dampak positif adalah seperti mulai diperkenalkan dengan sistem tanam padi baru dan pendirian sekolah Jepang di Magelang. Orang-orang muda selain mendapatkan pendidikan formal juga menerima pelatihan militer yang bermanfaat bagi perjuangan hidup rakyat Magelang di masa depan.

Kata kunci: pendudukan Jepang, perlawanan, Magelang

PENDAHULUAN

Masa pendudukan Jepang sering disebut sebagai garis pemisah dalam sejarah Indonesia modern. Politik pemerintah Jepang pada tahun itu dianggap penting memecahkan hubungan sosial tradisional pada tingkat lokal

serta menyiapkan kondisi bagi terciptanya latar belakang revolusi nasional dan sosial tahun 1945-1949 (Nagazumi 1988:33).

Masa pendudukan Jepang merupakan suatu periode penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada masa ini terjadi perubahan yang men-

dasar pada sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Diantara sekian banyak perubahan sosial yang dialami masyarakat Jawa selama masa pendudukan Jepang yang sangat menonjol adalah perubahan desa. Organisasi pedesaan langsung dihubungkan keluar dalam pengertian politik, ekonomi, dan spiritual. Dengan memperkenalkan lembaga sosial serta politik yang baru seperti koperasi dan rukun tetangga maka struktur otoritas tradisional di daerah pedesaan juga berubah. Hal itu tampak selama pendudukan Jepang dimana Kepala Desa diperlakukan sedikit lebih baik sebagai wakil pemerintah penjajah (Nagazumi 1998:83-84).

Setelah pendaratan pasukan Jepang di Kragan (Rembang). Rembang berhasil dikuasai oleh Jepang tanggal 1 Maret 1942. Gerak maju serangan pasukan Jepang kemudian dilanjutkan ke daerah lain. Gerak maju invasi Jepang itu terus berlanjut dan berhasil menguasai Purwodadi pada tanggal 3 Maret 1942. Dari Purwodadi kekuatan pasukan Jepang dibagi menjadi dua. Pasukan pertama yang dipimpin oleh Yamamoto dan Matsumoto bergerak melalui jalur Semberlawang terus menuju Surakarta. Pasukan yang kedua dipimpin oleh Kaneuyi yang melewati jalur Godong terus ke Boyolali. Kedua pasukan Jepang ini nantinya akan bergabung kembali di daerah Klaten.

Dalam waktu yang singkat daerah-daerah tersebut mampu ditaklukkan dan dikuasi oleh pasukan Jepang. Gerakan invasi pasukan Jepang kemudian terus dilakukan hingga mampu menguasai Surakarta dan Yogyakarta yang merupakan dua daerah istimewa di Jawa Tengah. Setelah berhasil menguasai Yogyakarta, pasukan Jepang dibagi menjadi dua pasukan. Pasukan yang pertama dipimpin Matsumoto maju melewati daerah Magelang kemudian Temanggung terus hingga daerah Banyu-

mas. Pasukan yang kedua dipimpin oleh Yamamoto dan Kaneuyi yang ditugaskan menguasai daerah selatan Jawa Tengah.

Magelang berhasil dikuasai Jepang tanggal 6 Maret setelah Surakarta dan Yogyakarta dapat dikuasai sebelumnya oleh Jepang pada tanggal 5 Maret 1942. Ketertarikan Jepang terhadap Magelang dipicu karena potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Magelang yang sangat melimpah. Ada beberapa hal yang menjadikan perlu untuk dikuasai. Pertama, Magelang merupakan pusat produksi hasil pertanian (pangan) berupa padi, sayuran dan buah-buahan serta tanaman komoditi (tembakau). Kedua, sebagai pusat administrasi pemerintahan Kota Madya Magelang dan Kabupaten Magelang. Ketiga, Magelang terletak di jalur transportasi utama daerah-daerah yang memiliki perekonomian yang cukup baik dalam bidang pertanian. Dengan menguasai Magelang maka mereka tidak perlu merasa khawatir berkaitan dengan pemenuhan keperluan pasukan mereka dalam berperang baik itu dalam masalah konsumsi pasukannya maupun untuk bahan baku persenjataan. Magelang juga merupakan pusat pemerintahan daripada Karesidenan Kedu yang meliputi daerah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang sendiri. Menguasai Magelang berarti Jepang dapat dengan mudah mengontrol dan menggunakan potensi-potensi daerah-daerah yang termasuk ke dalam lingkup Karesidenan Kedu dengan mudah, misal politik beras, dan perekrutan para pemuda guna dijadikan pasukan perang guna membantu perang Asia Timur Raya yang sedang dilakukannya. Dengan datangnya Jepang di Magelang terjadi berbagai perubahan di dalam masyarakatnya. Permasalahan inilah yang akan diangkat dalam tulisan

ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Langkah-langkah dalam metode ini yaitu pertama, heuristik yang terdiri dari studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan mencari sumber ke perpustakaan daerah Magelang, Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah, maupun Perpustakaan Universitas Negeri Semarang sendiri. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang telah memenuhi syarat berdasar ketentuan yang ada. Tahap kedua adalah kritik sumber yang terdiri dari kritik internal dan eksternal. Tahap ketiga yaitu interpretasi, merupakan tahap dimana data yang diperoleh diseleksi, dicari kausalitasnya satu dengan yang lain untuk kemudian dirangkai dan disusun menjadi sebuah deskripsi. Tahap yang keempat adalah historiografi, dimana penulis menyajikan hasil penelitian dalam bentuk cerita sejarah yang tersusun secara sistematis dan kronologis berupa sebuah deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintah Jepang terhadap Magelang

Pada masa pendudukan Jepang Jawa ditetapkan sebagai pemasok beras untuk pulau-pulau diluar Jawa serta untuk keperluan medan pertempuran di Pasifik Selatan. Beras yang didatangkan dari Jawa menjadi semakin penting karena semasa perang angkutan jarak jauh dan perkapalan sangat sulit serta keamanan di laut memburuk. Beras dari

Jawa terkenal enak. Jepang berniat memprioritaskan Pulau Jawa guna memenuhi kebutuhan akan beras. Dalam rangka pelaksanaannya Jawa sebagai bagian dari lingkungan bersama Asia Timur Raya mengemban dua tugas. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan. Kedua, mengusahakan produksi bahan makanan untuk kepentingan perang.

Jaman penjajahan Jepang di mana rakyat diwajibkan melaksanakan "wajib setor beras" ini juga biasa disebut "Zaman Kuintalan", karena berasal dari kata *Quintaal*, yang berarti 100 Kg (satuan berat yang diperkenalkan oleh Jepang). Para petani juga menyebut jaman ini sebagai jaman penyettori padi. Masyarakat diwajibkan untuk menyettori sejumlah padi sebanyak yang telah ditentukan pemerintah pendudukan dalam rangka mencukupi kebutuhan untuk perang.

Jepang menerapkan politik ekonomi yang desentralisasi. Dalam pelaksanaannya Jepang memberikan tanggungjawab mengumpulkan semua kebutuhan ekonomi pada pemerintah daerah. Setelah semua selesai baru kemudian dilaporkan kepada pimpinan pusat pemerintahan pendudukan. Selama pendudukan Jepang ini, untuk memperlancar kebijakan ekonomi Jepang secara terus menerus mengumandangkan propaganda mengenai pelipatgandaan hasil pangan melalui radio, surat kabar, penerbitan, ataupun pemutaran film.

Untuk memenuhi target kebutuhan akan beras bagi pasukannya yang sedang berperang Jepang memerintahkan untuk membuka lahan baru yaitu dengan cara menebangi hutan atau mengganti lahan perkebunan yang tidak bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan perang untuk kemudian ditanami beras guna keperluan perang. Jepang juga memperkenalkan cara

penanaman padi yang baru (*larikan*) yang tujuannya adalah untuk peningkatan hasil produksi beras. Disamping rakyat dituntut untuk menyetor beras dan menaikkan produksinya, mereka masih dibebani pekerjaan tambahan yang bersifat wajib, seperti menanam dan memelihara jarak (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 1993:49).

Untuk mengontrol dan upaya menaikkan hasil produksi beras di desa-desa, Jepang membentuk *Kumiai* (koperasi). Fungsi dari koperasi ini adalah untuk menampung beras yang berasal dari masyarakat terutama karena adanya wajib setor beras, juga sebagai sarana penyebar informasi berkaitan dengan kebijakan perekonomian Jepang.

Beras yang akan diberikan pada Jepang dikumpulkan melalui perangkat desa (Kepala Desa) atau melalui badan desa bentukan Jepang (*Sidoing*). *Sidoing* ini nantinya yang akan mengumpulkan beras dengan cara mendatangi rumah penduduk yang memiliki sawah untuk menarik beras. Penarikan beras dilakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali (Wawancara dengan Bapak. Simhadi, 17 April 2007).

Beras yang telah berhasil dikumpulkan oleh *Sidoing* disimpan di rumah Kepala Desa atau di koperasi (*Kumiai*) yang kedudukannya biasanya menjadi satu dengan kelurahan. Setelah itu para petugas Jepang akan mengmbilnya untuk kemudian disimpan di tangsi-tangsi penyimpanan beras mereka. Salah satu tangsi penyimpanan beras Jepang yang ada di Magelang antara lain berada di Komplek SECABA (Sekolah Calon Bintara) di jalan Ahmad Yani Magelang (Wawancara dengan Bapak Sabar 18 April 2007). Tetapi secara umum tangsi penyimpanan beras Jepang memang ditempatkan di daerah kompleks militer dan sangat dirahasiakan. Itu bertujuan untuk keamanan dan jaminan keraha-

siaan.

Beras yang mereka simpan itu nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pasukan Jepang yang sedang berperang. Beras itu nantinya akan dikirimkan dengan menggunakan kereta api atau truk. Sewaktu akan dilakukan pengiriman beras, pemerintahan Jepang di Magelang akan membunyikan sirine (oleh pemerintah Jepang digunakan sebagai pemberitahuan adanya musuh yang datang dan rakyat disuruh sembunyi). Bagi rakyat Magelang yang sedang ada di pinggir jalan diwajibkan untuk membalikkan badan pada saat truk atau kereta api itu akan lewat agar rakyat tidak mengetahui apa yang diangkut di dalamnya. Apabila ada yang menoleh atau melihat maka dia akan dihukum, biasanya berupa pukulan atau tendangan (Wawancara dengan Bapak. Rachmat, 17 April 2007).

Kebijakan keuangan Jepang yang berusaha mempertahankan nilai gulden atau rupiah Hindia Belanda guna mempertahankan harga barang-barang agar dapat dipertahankan seperti sebelum perang dan untuk mengawasi arus lalu lintas permodalan dan kredit tidak efektif. Terjadilah inflasi yang sangat parah terhadap Indonesia. Pada masa ini nilai tukar uang menjadi semakin kecil karena uang dibuat semakin banyak sehingga membuat nilai tukarnya menurun. Pada masa Jepang proses pembuatan uang dipusatkan di Yogyakarta. Bahkan, karena sangat kecilnya nilai tukar uang pada masa itu akibat adanya inflasi, gaji yang diterima orang Indonesia yang bekerja di pemerintah Jepang per bulannya nilainya sama dengan harga sebuah angka.

Selain kebijakan itu Jepang juga memberlakukan kebijakan wajib bayar pajak yang diambil dari berbagai sumber misal pajak tanah, pajak produksi, atau juga pajak penghasilan. Selain itu,

para petani di Magelang juga diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan “tanam-wajib” lainnya yaitu menanam rami dan jarak (Wawancara dengan Bapak. Simhadi, 17 April 2007).

Apabila dibandingkan antara tingkat perekonomian pada masa Jepang dengan masa Belanda, Bapak Simhadi, Bapak Rachmat maupun Bapak Sabar sama-sama mengatakan bahwa pada masa Belanda lebih baik daripada masa Jepang, meskipun sama-sama dalam kondisi terjajah. Pada masa Belanda apa-apa ada (barang keperluan sehari-hari selalu ada), sedang pada masa Jepang kebalikannya (tidak ada atau sulit dicari). Pada dasarnya pada masa Jepang apa-apa yang ada dianggap milik Jepang atau setidaknya boleh digunakan oleh Jepang.

Jepang juga memberi perhatian terhadap masalah sosial ekonomi kemasyarakatan. Pemerintahan pendudukan Jepang melakukan beberapa perubahan, terutama berkaitan dengan masalah sosial ekonomi kemasyarakatan itu. Di masa pendudukan Jepang, organisasi pedesaan secara langsung dihubungkan dengan dunia luar dalam pengertian politik, ekonomi dan spiritual (Kurasawa dalam Nagazumi, 1988: 83).

Struktur otoritas di daerah pedesaan juga dirubah. Selama pendudukan Jepang, kepala desa dan para pembantunya diperlakukan sedikit lebih baik seperti wakil pemerintah pusat, dan menjalankan perintah dari atas untuk keuntungan pengusaha penjajahan (Kurasawa dalam Nagazumi, 1988: 84). Pada masa pendudukan Jepang ini struktur sosial di daerah pedesaan berubah. Para pejabat pamong praja (pangreh praja) beserta stafnya berada di puncak hierarki sosial. Mereka pada umumnya adalah berasal dari kota yang tidak berminat pada sektor pertanian di pedesaan.

Selama masa pendudukan itu seorang Kepala Desa dan perangkatnya diperlakukan sebagai alat pemerintah pusat, alat penguasa sehingga mereka menjalankan perintah dari atas untuk keuntungan Jepang (Soemarmo, 2001: 51). Mereka diberi tugas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di tingkat pedesaan. Tugas mereka antara lain mengumpulkan beras dari warga desa, merekrut *romusha*, merekrut para pemuda/pemudi untuk mendapat didikan militer guna keperluan perang Jepang.

Di antara penduduk dari golongan petani, kepala desa dan para pembantunya mempunyai *prestise* sosial yang sangat tinggi. Diluar kelompok pamong desa, stratifikasi sosial didasarkan atas kepemilikan tanah, yang menempati golongan pertama masyarakat ini adalah *kuli kenceng*, mereka yang memiliki sawah yang mudah dialiri. Kelas ini juga mencakup mereka yang memiliki tanah kering yang mudah ditanami tetapi status mereka berada di bawah para pemilik tanah. Tingkat sosial di bawahnya adalah *kuli karangkopek*, yang memiliki tanah hanya pekarangan. Berikutnya adalah *kuli indung*, yang sama sekali tidak memiliki tanah tapi punya rumah. Kelas terakhir adalah *indung tlosor*, yang tidak punya tanah maupun rumah dan menumpang pada keluarga lain dan bekerja untuk mereka (Soemardjan, 1981: 41).

Pada masa pendudukan Jepang ini nasib petani tak banyak berbeda. Mereka berada di tingkat paling bawah dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Sangat sulit bagi mereka untuk merubah posisi mereka karena kewajiban yang harus dipenuhi. Tak ubahnya pada masa pendudukan Belanda, pada masa pendudukan Jepang juga tak jauh berbeda. Terjadi peralihan kepemilikan tanah di dalam masyarakat dari para petani ke pemerintahan pendudukan

Jepang di Magelang (Wawancara dengan Bapak Sabar 18 April 2007).

Perubahan stratifikasi sosial berlangsung di masyarakat dimana orang Jepang menduduki kelas tertinggi. Kelas berikutnya ditempati oleh orang-orang Eropa terutama sekutu dari Jepang. Kelas berikutnya adalah orang Indonesia. Kelas terbawah adalah orang-orang Belanda dan sekutunya (orang-orang Cina). Penduduk keturunan Cina di Muntilan dibenci oleh Jepang karena dianggap sebagai kaki tangan Belanda pada masa itu.

Perubahan ini juga diikuti adanya perubahan sosial sehari-hari. Kebiasaan yang dilakukan orang Jepang setiap harinya harus diikuti. Di Magelang sendiri juga demikian. Setiap hari ada kewajiban yang harus dilakukan, yaitu mengikuti kebiasaan orang Jepang. Kewajiban itu antara lain setiap pukul 7 pagi diharuskan menghadap ke arah Timur menghadap matahari (memberi hormat kepada Dewa Matahari), serta melaksanakan Upacara *Tenno Heika* menghadap arah Timur Laut (memberi hormat kepada Kaisar Jepang).

Kedua kewajiban ini harus dilaksanakan oleh semua orang di mana saja mereka berada. Apabila ada yang melanggar maka akan dihukum. Selain itu, rakyat Magelang juga diwajibkan memberi hormat kepada setiap orang Jepang yang mereka temui di jalan (Wawancara dengan Bapak Rachmat, 17 April 2007). Ada juga kewajiban untuk berolahraga (melakukan senam) bagi rakyat terutama bagi para pemuda yang sedang mendapat pendidikan militer. Kegiatan olahraga senam ini biasanya dilakukan secara bersama-sama di Stadion Tidar (sekarang bernama Stadion Abu Bakrin). Pada waktu Jepang menduduki Magelang hampir tidak ada pembangunan, kecuali membuat Stadion Tidar yang dikerjakan secara gotong royong oleh seluruh masyarakat,

pegawai, pejabat dan anak-anak sekolah dan tentunya para *romusha*.

Kondisi ekonomi sangat parah sebab segala hasil produksi disedot untuk kepentingan perang. Kekayaan rakyat dikuras sampai ke "*balung sumsumnya*". Kemelaratan berkecamuk dan kelaparan berjangkit hampir di seluruh Indonesia akibatnya timbullah golongan yang disebut "*kere*" atau "*gembel*" dalam jumlah yang sangat besar. Untuk membangun prasarana perang seperti kubukubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara dan lain-lain, Jepang memerlukan banyak tenaga kasar. Selain itu, diperlukan juga tenaga kasar untuk bekerja di pabrik-pabrik dan pelabuhan-pelabuhan. Tenaga-tenaga inilah yang disebut *romusha*. Pulau Jawa sebagai pulau yang padat penduduknya memungkinkan pengerahan tenaga tersebut secara besar-besaran. Pada mulanya tugas-tugas yang dilakukan itu bersifat sukarela, tetapi lama kelamaan karena kebutuhan yang terus meningkat di seluruh Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela berubah menjadi paksaan. Beribu-ribu *romusha* dikirim ke luar Jawa bahkan ke luar Indonesia, seperti Birma, Muangthai, Vietnam dan Malaya.

Di Magelang tenaga *romusha* direkrut oleh Kepala Desa. Tenaga *romusha* yang direkrut biasanya orang yang masih muda, sehat dan kuat. Tenaga *romusha* yang direkrut ini berasal dari desa-desa yang ada di Magelang. Mereka direkrut untuk membangun prasarana perang Jepang, misalnya membangun gua-gua perlindungan dan persembunyian di daerah-daerah pegunungan (misal di daerah Windusari, Kabupaten Magelang), membangun jalan bawah tanah sebagai alat pertahanan dari serangan musuh (misal di daerah Jambon, belakang Koramil), memperbaiki landasan udara yang ada di Bukit Tidar yang rusak karena politik

bumi hangus Belanda., Merusak jalan raya sebagai cara memperlambat musuh (menghancurkan jalan raya atau minimal aspalnya harus mengelupas), setiap jarak 1 Km pada jalan raya harus dibangun *rugrat* (lubang jebakan sekaligus lubang persembunyian), membangun asrama bagi siswa sekolah yang ada di Magelang (Wawancara dengan Bapak Sabar 18 April 2007).

Di Magelang para *romusha* ini pada saat direkrut dijanjikan akan mendapat bayaran setiap harinya. Tetapi pada pelaksanaannya tidak demikian. Para *romusha* ini diperlakukan sangat buruk. Sejak dari pagi hingga petang hari mereka diharuskan bekerja kasar tanpa makanan yang cukup (bahkan tidak makan sama sekali) dan juga tanpa perawatan cukup. Bayaran uang yang dijanjikan oleh Jepang tidak pernah ada. *Romusha* mendapat jatah makan tiap harinya, bukan berupa nasi (beras) melainkan berupa gronjol atau tiwul (terbuat dari ketela) yang juga dianggap sebagai bayaran mereka karena telah bekerja selama satu hari (Wawancara dengan Bapak Sabar 18 April 2007).

Kondisi itu membuat para *romusha* menderita kelemahan fisik, sehingga mereka tidak mampu bekerja lagi. Jika diantara mereka ada yang berani beristirahat sekalipun hanya sebentar maka hal itu akan mengundang makian atau pukulan dari pengawas mereka yang orang Jepang. Masa istirahat yang diperbolehkan adalah pada malam hari (tidur). Dalam keadaan fisik yang lemah membuat mereka tidak tahan (rentan) terhadap penyakit. Karena tidak sempat memasak air minum, sedangkan buang air di sembarang tempat maka mereka terjangkit wabah disentri. Mereka juga terjangkit wabah malaria karena tidak bisa menghindarkan diri dari serangan nyamuk (Poesponegoro dan Noto-susanto [ed], 1993:39).

Selain itu juga merebaknya penyakit beri-beri dan kutu yang memperparah penderitaan rakyat Magelang. Banyak dari para *romusha* ini yang mati karena *koreng* (infeksi luka). Selain mati karena kekurangan makan dan penyakit akibat kerja kasar yang mereka lakukan banyak *romusha* yang mati karena sengaja dibunuh untuk menjaga kerahasiaan setelah membangun prasarana perang Jepang agar tidak diketahui musuh. Mayat para *romusha* tergeletak dimana-mana dan dibiarkan saja tidak ada yang mengurus. Pemandangan itu terlihat setiap hari dan sudah biasa. *Romusha* yang berasal yang dikirim ke daerah lain misal ke Jawa Barat atau Jawa Timur atau juga ke luar Pulau Jawa seperti ke Sumatra atau Kalimantan banyak yang tidak kembali. Bapak Sabar yang merupakan mantan *romusha* merasa beruntung hanya dipekerjakan di wilayah Magelang dan bisa bertahan. Temannya yang bernama Kirman tidak bisa bertahan dan akhirnya meninggal pada saat membangun jebakan di sepanjang jalan karena mendapat siksaan dari tentara Jepang dan kekurangan makan (Wawancara dengan Bapak Sabar 18 April 2007).

Penderitaan tidak hanya diterima oleh para pemuda, tetapi juga para wanita. Oleh orang-orang Jepang mereka dijadikan *Jugunianfu* (*gundik*), lebih diutamakan adalah yang masih perawan. Mereka dijadikan pemuas hasrat seksual pasukan Jepang. Orang-orang Jepang menjanjikan kepada para wanita tersebut untuk kemudian dijadikan isteri dan akan dibawa ke Jepang. Para *Jugunianfu* itu diambil dari desa atau kampung yang ada di Magelang. Saat itu apabila ada orang Jepang yang tertarik kepada seorang wanita maka dia berhak untuk memilikinya. Barangsiapa yang melawan atau mencegahnya maka orang itu akan dibunuh (Wawancara dengan Bapak Rachmat 17

April 2007).

Para pemuda Magelang selain direkrut untuk menjadi *romusha* juga direkrut untuk menjadi tentara atau dididik kemiliteran dengan tujuan mengamankan Magelang atau membantu Jepang dalam perang yang sedang dilakukan. Para pemuda ini mendapat latihan kemiliteran terutama baris-berbaris. Para pemuda yang direkrut merupakan orang-orang pilihan (berani dan kuat) terutama yang ditunjuk untuk menjadi pasukan yang membantu langsung Jepang dalam berperang. Ada beberapa pilihan yang ditawarkan para pemuda itu, antara lain: (1) Menjadi pasukan militer Jepang yang membantu Jepang langsung dalam perang (*HEIHO*), untuk ditempatkan dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut; (2) Menjadi pasukan PETA (berasal dari golongan masyarakat) yang bertugas mengamankan Magelang.

Bahkan, menjelang tahun 1945 di Magelang dibentuk kompi yang beroperasi di daerah. Diadakan pendidikan atau penerimaan prajurit tentara PETA angkatan pertama di Magelang. Pada saat itu baru dapat terbentuk 2 batalyon atau *Daidan*. *Dai Ici Daidan* berkedudukan di Gombong dan *Dai Ni Daidan* berkedudukan di Magelang dengan nama lengkapnya *Kedu Dai Ni Daidan* atau Batalyon II Kedu (Wiyono, dkk, 1991: 30).

Dari kelurahan mereka dikirim ke kecamatan seterusnya dikirim dan dikumpulkan di kawedanan, kemudian mereka diberangkatkan dari pendopo Kabupaten Purworejo menuju tempat pendidikan di tangsi Tuguran, Magelang (Wiyono, dkk, 1991: 29).

Dapat dikatakan bahwa terdapat tiga prinsip pokok pada kebijaksanaan di bidang pendidikan yang dilakukan Jepang selama masa pendudukannya, yaitu: (1) Pendidikan ditata kembali atas

dasar keseragaman dan kesamaan untuk seluruh kelompok etnis dan kelas sosial (berbeda dengan masa kolonial Belanda yang membedakan pendidikan berdasar ras); (2) Secara sistematis pengaruh Belanda dihapuskan dari sekolah-sekolah, sedangkan unsur-unsur kebudayaan Indonesia dijadikan landasan utama; (3) Semua lembaga pendidikan dijadikan alat untuk memasukkan doktrin gagasan Kemakmuran Bersama Asia Tenggara di bawah pimpinan Jepang (Lapian, 1988:87).

Kelompok masyarakat yang benar-benar mendapatkan perhatian untuk digarap secara serius oleh pemerintah pendudukan Jepang ialah kelompok pemuda. Meski berasal dari strata sosial yang berbeda-beda mereka ini dihimpun dalam suatu organisasi yang sama. Mengapa perhatian Jepang dicurahkan kepada kaum muda? Karena umumnya pemuda memiliki sifat giat bekerja/kerja keras, dan semangat tinggi/yang diliputi oleh idealisme yang tinggi. Mereka belum dipengaruhi oleh alam pikiran Barat.

Pada masa pendudukan Jepang masalah pendidikan tidak diperhatikan, tidak seperti pada masa Hindia Belanda. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500, sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20, Perguruan Tinggi/Fakultas terdiri dari 4 buah, dapat dikatakan untuk berapa lama belum dapat melakukan kegiatan-kegiatannya. Pendidikan bagi rakyat yang kurang diperhatikan ini mempengaruhi tingkat intelektualitas mereka. Angka buta huruf tinggi sekali walaupun memang ada di sana-sini dilakukan usaha untuk pemberantasan buta huruf. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan kepada keperluan Perang Asia Timur Raya (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 1983: 52)

Di sekolah Bahasa Indonesia digunakan sebagai mata pelajaran

utama. Bahasa Jepang diberikan sebagai mata pelajaran wajib. Kita sangat diuntungkan dengan adanya peraturan itu, karena Bahasa Indonesia dapat berkembang. Para siswa di sekolah tersebut juga dilibatkan dalam usaha yang berkaitan dengan perang yang dilakukan Jepang. Sekolah pada saat itu merupakan tempat indoktrinasi Jepang. Melalui pendidikan itu mentalitas dan cara berpikir masyarakat dapat diubah dan dialihkan, dari mentalitas Eropa kepada "alam pikiran Nippon" (Lapian, 1988: 87). Pendidikan yang ada adalah untuk memelopori dan membentuk kader bagi konsepsi untuk memenangkan perang. Salah satu contoh indoktrinasi itu ialah bahwa setiap siswa diharuskan bersumpah (Sumpah Pelajar) setia kepada Jepang. Sumpah itu berbunyi:

"ware rawa sing njawani gaturowari, ware rawa daeniponno sidhhonomoto, dai toak zeinozungzai tarangkotowok chiko, dai toak kensetsu notomunimnaki " (Wawancara dengan Bapak Rachmat 17 April 2007)

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah:

"Kami pemuda maju kedepan berani untuk menyempurnakan pembangunan dan kesejahteraan Asia Timur Raya di bawah pimpinan *Dai Nippon*, kami pemuda mementingkan budi pekerti dan menjunjung tinggi peraturan seinendan, kami pemuda berusaha sekuat-kuatnya dalam pekerjaan kami masing-masing dan maju terus memperbanyak hasil usaha, kami pemuda mempertahankan Tanah Air kami dengan sekuat tenaga sambil bekerja bersama-sama sepenuhnya, kami pemuda menghargai semangat yang bersahaja dan teguh, bersumpah akan melatih jasmani dan rohani,

menuju cita-cita yang tinggi."

Para pelajar atau pemuda Jawa itu secara otomatis dimasukkan dalam organisasi *Djawa Seinendan* untuk dididik untuk fanatik dan berpendirian ekstrim dengan latihan-latihan fasistis dan indoktrinasi Jepang secara efektif. Di Magelang sendiri juga berdiri sekolah-sekolah Jepang, antara lain: (1) sekolah calon guru (*shihan gakko*); (2) sekolah menengah pertama (*tsu gakko*); (3) sekolah pertanian (*no-gakko*); (4) sekolah bahasa Jepang (*zokyu nippono gakko*).

Bagi Jepang Magelang memiliki manfaat politis. Mengapa demikian? Karena Magelang terletak di tengah-tengah dan mempunyai manfaat lebih dalam rangka mengawasi daerah sekitarnya. Dengan menguasai Magelang sangat mudah mengontrol daerah-daerah kekuasaan Jepang di sekitarnya karena Magelang terletak di tengah jalur yang menghubungkan utara-selatan maupun timur-barat. Magelang sendiri merupakan kota yang dapat disebut kota pendidikan militer. Bekas gedung kompleks Secaba sekarang pada masa Jepang dijadikan tempat pendidikan kemiliteran dalam rangka merekrut pasukan perang baik itu untuk Peta, *Heiho*, *Seinendan*, *Keibodan* guna membantu perang yang dilakukan Jepang dalam lingkup se-Karesidenan Kedu.

Pengaruh Pendudukan Jepang terhadap Masyarakat Magelang

Bagi masyarakat pedesaan, terutama para petani kewajiban serah padi ini dirasa sangat berat. Para petani diharuskan memenuhi kuota beras yang telah ditentukan pemerintah. Penyerahan padi yang luar biasa besarnya ini telah menekankan kehidupan ekonomi petani secara serius. Mudah diduga bahwa rakyat, yang selama zaman Belanda

hanya makan 60% saja dari apa yang dibutuhkan, terpaksa harus lebih banyak lagi mengurangi konsumsi mereka, dan akan menderita kelaparan. Kekurangan pangan yang juga terjadi secara langsung juga berdampak pada kesejahteraan petani. Bahkan, ini juga berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat yang buruk, banyak dari mereka yang menderita penyakit beri-beri, busung lapar, kudisan, dan lain-lain. Petani yang menanam padi tidak dapat merasakan hasil jerih payahnya tetapi harus makan apa yang ada misalnya umbi, pohon pisang, kulit pisang, kulit ubi kayu, batang pohon pepaya hanya untuk bertahan hidup, padahal jelas bahwa apa yang mereka makan itu mengandung sangat sedikit vitamin. Ini berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat yang sangat buruk, banyak dari mereka yang menderita penyakit beri-beri, busung lapar, kudisan dan lain-lain.

Tak berbeda dengan apa yang terjadi di Magelang. Kehidupan Magelang sejak pendudukan Jepang sangat sulit terutama dibidang perekonomian. Sebagian produk pangan rakyat dirampas Jepang untuk memenuhi kebutuhan logistik mereka dan untuk biaya perang melawan Sekutu.

Kondisi perekonomian Magelang sangat buruk pada masa kekuasaan Jepang. Kebijakan wajib setor beras yang diberlakukan oleh pemerintahan Jepang juga diberlakukan di Magelang. Para petani diwajibkan untuk menyeter beras kepada pemerintah Jepang sebanyak 50% dari hasil sawahnya secara keseluruhan. Apabila itu tidak dituruti/dilakukan maka yang melanggar akan diberi hukuman. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman penjara atau perampasan sawahnya, bahkan dapat juga dibunuh. Kadang untuk menghindari atau setidaknya agar bisa tetap bertahan hidup mereka menyim-

pan sebagian beras yang mereka miliki dengan cara menguburnya di dalam lubang yang telah mereka buat di dalam rumah. Lubang itu biasanya berkisar pada kedalaman 1 m (Wawancara dengan Bapak. Simhadi, 17 April 2007).

Adanya kebijakan wajib setor beras semakin mempersulit kondisi warga Magelang. Pada masa itu mereka mengalami kesulitan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka sendiri. Beras dari hasil sawah mereka dirampas Jepang, sedangkan mereka sendiri juga butuh makan. Hasil panen mereka telah berkurang setengah dari yang semestinya mereka peroleh sehingga mereka terpaksa mencukupi kebutuhan konsumsi mereka dengan apa yang masih mereka miliki (Wawancara dengan Bapak. Sabar, 18 April 2007).

Kebijakan ini menimbulkan kekurangan pangan yang juga secara langsung berpengaruh pada kesejahteraan petani. Para petani tidak dapat menjual hasil panen mereka karena adanya kebijakan yang mewajibkan mereka untuk menjual hasil pertanian mereka kepada Jepang. Tetapi apabila mereka berhasil menjualnyapun tidak banyak berbeda. Disamping harga yang murah di pasar-pasar pun tidak ada beras yang dijual. Bapak Sabar mengatakan bahwa pada masa itu bisa makan beras satu kali sehari itu sudah bagus. Fakta yang ada mendukung pendapat itu. Ada sebuah keluarga di daerah Cuk Kramat yang merupakan keluarga yang terpandang dan dianggap kaya di daerah tersebut karena kebijakan wajib setor beras yang diberlakukan pemerintahan pendudukan Jepang kemudian menjadi sebuah keluarga yang serba kekurangan. Mereka harus menyeter beras kepada Jepang hingga mencapai 75% dari hasil sawahnya. Hingga terpaksalah orang dari keluarga itu pergi ke daerah lain untuk sekedar mencari makan

(Wawancara dengan Bapak Simhadi, 17 April 2007).

Keadaan perekonomian yang sulit itu diperburuk dengan adanya blokade ekonomi Belanda terhadap Republik Indonesia. Blokade ekonomi ini adalah berupa larangan masuk barang-barang dan makanan maupun persenjataan ke Indonesia, baik melalui darat maupun laut. Kesulitan yang diderita penduduk Magelang antara lain adalah adanya peredaran Oeang Republik Indonesia (ORI) palsu yang dikeluarkan oleh Belanda (Priadji, 1995:75).

Penduduk Magelang apabila akan mencari kebutuhan sehari-hari terpaksa harus membeli di daerah lainnya, seperti Ambarawa, Semarang dan Salatiga dengan harga yang sangat mahal, karena daerah itu dekat dengan pelabuhan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi (keluar masuk barang dari daerah lain) yang melewati jalur laut.

Barang-barang kebutuhan sehari-hari misalnya bahan makanan dan pakaian sangat jarang bahkan hampir tidak ada. Barang industri sangat sulit didapat terutama tekstil. Akibatnya pakaian rakyat terbuat dari serat rami, karung goni, atau bagor. Apabila dipakai dan badan masih agak basah pakaian itu lengket di kulit. Itu pun jumlahnya sangat terbatas. Setiap orang pada umumnya hanya punya satu atau dua stel. Sebab itu sering terjadi bila orang harus mencucinya maka sambil menanti pakaian itu dijemur ia harus tetap berendam di sungai sampai pakaian itu kering untuk segera dapat dipakainya kembali (Soemarmo, 2001: 40).

Dapat dikatakan bahwa bidang perdagangan pada masa ini lumpuh atau tidak dapat berjalan karena menipisnya persediaan akibat barang yang dibutuhkan atau dicari tidak ada begitu juga uang untuk membelinya ti-

dak sebanding nilainya.

Di Magelang sendiri kondisinya juga tak jauh berbeda. Rakyat Magelang juga mengalami kesulitan memperoleh sandang. Mereka menggunakan karung goni dan bagor sebagai bahan membuat pakaian sehari-hari. Bahkan sepeda yang digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari oleh rakyat Magelang menggunakan karet mentah untuk rodanya (Wawancara dengan Bapak Simhadi, 17 April 2007).

Praktik- praktik *romusha* merupakan bentuk yang sangat nyata dari praktik eksploitasi tenaga kerja dan manusia pada masa pendudukan Jepang. Hal itu sekaligus merupakan suatu bentuk pemiskinan mentalitas masyarakat. Dengan demikian telah terjadi perubahan mentalitas masyarakat yang sangat mendasar pada masa pendudukan Jepang sebagai akibat penetrasi dan sistem pendudukan yang bersifat militer.

Keadaan yang sangat buruk itu menghantui masyarakat desa yang harus juga mengirinkan penduduknya untuk berangkat menjadi *romusha*. Hal itu berkembang menjadi ketakutan kolektif dan kegelisahan komunal. Masyarakat desa tidak berani menentang perintah Jepang di satu sisi, tetapi tidak menginginkan berangkat sebagai tenaga paksa Jepang. Akhirnya terjadi kekerdilan mental sebagai akibat penetrasi politik yang sangat keras. Tekanan-tekanan politik, ekonomi, sosial dan kultural saat itu telah menciptakan kondisi masyarakat pedesaan yang diliputi kecemasan dan ketakutan.

Pendudukan Jepang di Magelang tidak hanya membawa dampak negatif yang berupa menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat kematian yang sangat tinggi baik karena masalah kesehatan maupun kekurangan ekonomi, atau kemunduran mental. Tetapi pendudukan Jepang juga memberi dam-

pak yang positif bagi rakyat Magelang, misalnya pengenalan teknik bercocok tanam padi yang baru (*larikan*) yang membuat hasil panen rakyat meningkat. Begitu juga dengan pendirian sekolah pertanian di daerah Mertoyudan dalam rangka peningkatan hasil produksi pertanian (menemukan bibit unggul) yang secara tidak langsung mendorong perubahan ke arah yang lebih baik terutama dalam hal bercocok tanam.

Selain itu ada pula pendidikan militer yang diberikan baik di sekolah-sekolah maupun melalui organisasi semi militer maupun organisasi militer bentukan Jepang (*Heiho, Peta, Seinendan, Keibondan*) kepada para pemuda dan pemudi Magelang yang bermanfaat bagi peningkatan kedisiplinan dan juga bangkitnya rasa nasionalisme, terutama berkaitan dengan usaha merebut kemerdekaan dan juga mempertahankan daerah Magelang pada masa-masa perjuangan selanjutnya.

Masalah pendidikan yang meski pada masa pendudukan ini tidak terlalu diperhatikan, adanya sekolah-sekolah Jepang yang dibuka di Magelang semakin meningkatkan tingkat intelektual masyarakat. Pendidikan kesehatan (membalut luka, bedah peluru) juga diberikan di sekolah-sekolah terutama kepada para wanita. Para wanita ini nantinya menjadi orang-orang yang memegang peranan penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, karena tentunya dalam peperangan seorang tenaga medis dan pengobatan sangat dibutuhkan. (Wawancara dengan Ibu Hardjanti, 17 April 2007).

Perjuangan melawan pendudukan Jepang

Rakyat Magelang telah sampai pada puncak penderitaan lahir dan

batin. Penderitaan yang memuncak itu mau tidak mau menimbulkan dan menambah rasa benci terhadap Jepang. Muncul pula rasa nasionalisme dalam diri rakyat Magelang untuk bebas dari penderitaan itu. Timbullah perlawanan lokal terhadap Jepang di Magelang.

Tidak lama setelah serbuan bala tentara Jepang secara mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941. Amerika Serikat yang seakan-akan lumpuh itu segera bangkit. Lebih-lebih setelah lima bulan Perang Asia Timur Raya berkobar, Amerika Serikat telah dapat memukul balik Jepang (Utomo, 1995:209).

Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima yang menewaskan sedikitnya 78.000 orang. Pada tanggal 9 Agustus bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki (Ricklefs, 1991: 314). Dan akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945.

Situasi pada bulan-bulan mendekati jatuhnya penjajahan Jepang penuh dengan ketegangan, terutama di kota yang strategis seperti Magelang dan Semarang. Di Magelang para pemimpin mulai melakukan kegiatan. Dari kegiatan bekerja sama dengan pemerintah Jepang atau paling sedikit kurang memusuhi pihak Jepang sekarang beralih kepada gerakan rahasia atau ilegal untuk menentang kekuasaan Jepang. Gerakan yang dilakukan antara lain dengan cara menyusup ke dalam pemerintahan pendudukan Jepang. Ada juga yang menggunakan cara lainnya yaitu dengan cara mendirikan usaha berupa kedai makan yang sering digunakan untuk menyelenggarakan rapat dan pertemuan rahasia melawan pemerintah pendudukan Jepang (Wiyono,dkk, 1991: 39).

Berita penyerahan Jepang kepada Sekutu dan Proklamasi semula diterima

dengan keragu-raguan oleh masyarakat Magelang. Betapa tidak, tentara Jepang masih berkuasa dalam kota, juga pemerintahan sipil berjalan biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka yang tergabung dalam "Berisan Pelopor" (dimana duduk Alm. Dr. Mardjaban, W. Sumowarsito, Adisunjojo, Sahid, Sulito, Kusman dan Abdulkadir) setelah mendengar berita Proklamasi itu segera mengadakan perundingan pada tanggal 19 Agustus 1945, membicarakan apa tindakan yang perlu diadakan guna menghadapi perubahan politik yang mendadak itu (Arsip Sejarah Peristiwa Magelang, KODAM VII/DIPONEGORO).

Pada tanggal 13 September 1945 telah diumumkan Proklamasi kemerdekaan Indonesia di Magelang. Tetapi, timbul permasalahan baru yang harus dipecahkan. Pertama, pemindahan kekuasaan dari Jepang (kalau perlu dengan perebutan); Kedua, usaha memperoleh senjata.

Sebagai langkah pertama kemudian diadakan suatu gerakan penempelan bendera Merah Putih, yang digerakkan secara serentak pada tanggal 23 September 1945 malam hari, sesudah terlebih dahulu diadakan pertemuan kilat yang berupa pembulatan tekad bertempat di sebuah gedung di jalan Poncol, depan fotostudio "Gah Hien", gedung yang mana sekarang ditempati Dr. Kusen (Arsip Sejarah Peristiwa Magelang, KODAM VII/DIPONEGORO).

Terjadi suatu insiden karena hal itu, yang biasa disebut "Insiden Hotel Nitaka" (saat ini Polwil Kedu). Insiden itu disebabkan karena ada orang Jepang yang mencopot bendera Merah Putih yang dipasang di tembok hotel itu. Hotel tersebut waktu itu merupakan markas RAPWI (Relief Action Prisoners of War and Interness) yaitu pasukan Sekutu yang bertugas menangani para

tahanan perang dan hasil pampasan perang, yang dijaga serdadu Jepang. Seorang pemuda yang melihat kejadian itu segera mendatangi serdadu tersebut untuk memprotes, pertengkaranpun timbul dan dengan teriakan "Siap" berkali-kali maka dalam sekejap saja gedung itu telah dikepung oleh ratusan orang dengan bermacam-macam senjata, dari bambu runcing, pisau batu dan lain-lain (Soekimin Adiwiratmoko, tanpa tahun: 17).

Untuk menyelesaikan masalah tersebut keduanya bersepakat untuk membicarakannya di markas *Kempetai* (gedung SMIP Wiyasa). Tetapi pembicaraan itu tidak menemukan kesepakatan. Mereka kemudian berbondong-bondong menuju markas Nakamura Butai, yang merupakan komandan pasukan Jepang, untuk membicarakan masalah kemerdekaan itu. Tetapi, tidak ada keputusan yang dihasilkan dan semakin membuat kecewa para pemuda yang berkumpul itu.

Pada tanggal 25 September 1945 pagi hari, sedang diadakan upacara bendera di Gunung Tidar. Tetapi, selagi upacara mendekati akhirnya, terdengar suara tembakan dari arah Gedung *Kempetai*. Tidak lama kemudian rakyat menyerbu Gedung *Kempetai* dengan menggunakan senjata seadanya. Pasukan Jepang sendiri kemudian menembaki orang-orang yang menyerbu itu. Jatuhlah korban 11 orang dan 4 orang diantaranya gugur dalam pertempuran itu, yaitu Kusni, Slamet, Samad Sastrodimedjo, dan Djajus. Untuk mengenang kejadian kepahlawanan itu kemudian dibangun tugu di dekat Gunung Tidar. (Arsip Sejarah Peristiwa Magelang, KODAM VII/DIPONEGORO).

Tentara Inggris kemudian datang di Magelang tanggal 26 Oktober 1945. Oleh Sekutu mereka ditugaskan untuk mengurus tahanan perang yang ada di Magelang. Tetapi ternyata mereka mem-

bawa maksud lain, yaitu dengan NICA yang juga menjadi bagian dari pasukan mereka. NICA merupakan pasukan kolonial Belanda. Mereka dicurigai akan berusaha mencoba menduduki Magelang kembali. Setelah datang mereka membangun benteng, mengeluarkan larangan dan aturan yang harus dipatuhi rakyat Magelang. Itulah yang membuat rakyat menjadi tidak senang, hingga pada akhirnya terjadi pertempuran yang dahsyat. Pertempuran itu baru berhenti setelah Presiden Soekarno datang di Magelang dan berunding dengan pihak Sekutu agar pertempuran tidak diteruskan. Perundingan itu menghasilkan keputusan untuk gencatan senjata. Hingga pada akhirnya tanggal 21 November 1945 (malam hari) karena sadar adanya perbedaan kekuatan yang sangat mencolok pasukan Inggris mundur dan meninggalkan Magelang menuju Ambarawa.

SIMPULAN

Ketertarikan Jepang untuk menguasai Magelang tak cuma karena Magelang memiliki letak yang strategis karena berada di tengah-tengah dan dapat bermanfaat dalam kaitannya dengan keamanan (mengawasi daerah kekuasaan Jepang di sekitarnya) tetapi juga karena Magelang memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat mendukung perang yang sedang dilakukan Jepang. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang berlaku di Magelang antara lain wajib setor beras, pajak, *romusha* dan lain-lain. Kebijakan itu berpengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat (pendidikan). Pendudukan Jepang tak hanya memberi dampak yang buruk saja, tetapi juga ada dampak yang baik bagi masyarakat Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Sejarah Peristiwa Magelang Kodam VII/Diponegoro
- Arsip Sejarah Kodam VII/Diponegoro Lopian. 1988. *Dibawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang Yang Mengalaminya*. Jakarta: Arsip Nasional RI
- Nagazumi, Akira. 1988. *Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Terjemahan Taufik Abdullah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (ed). 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Priadji. 1997. "Perjuangan Komando Distrik Magelang Pada Masa Revolusi Fisik Tahun 1948-1949". *Skripsi*. Jurusan Sejarah UNNES
- Ricklefs, MC. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Terjemahan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Soemardjan, Selo. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: UGM Press
- Soemarmo, AJ. 2001. *Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Utomo, Budi Cahyo. 1995. *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Semarang : IKIP Semarang Press
- Wiyono. dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Tengah*. Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wawancara
- Wawancara Bapak Rachmat, tanggal 17 April 2007

Wawancara Bapak Sabar Mitro Utomo,
tanggal 18 April 2007
Wawancara Bapak Simhadi B.A, tanggal

17 April 2007
Wawancara Ibu Hardjanti, tanggal 17
April 2007